

# **PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

**(Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Brebes)**

**Cinti Rahayu<sup>1</sup> dan Amirah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi

<sup>2</sup>Program Studi Manajemen Perpajakan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti

## **ABSTRACT**

---

*This study aims to prove the influence of program pemutihan motor vehicle tax (PKB), free transfer of name (BBNKB), and socialization taxation to the taxpayer to pay motor vehicle tax SAMSAT office Brebes. The population of this study are all motor vehicle taxpayers registered at SAMSAT Brebes Joint Office. This sample used in this research is accidental sampling method is the technique of determining the sample by chance, ie anyone who by chance met with the researchers. Data were collected by survey method with questionnaires, and questionnaires were eligible for 100 questionnaires. Data analysis technique used Multiple Linear Regression Analysis. The results showed partialy had an affect that program pemutihan motor vehicle tax (PKB) with significant value  $0,000 < 0,005$ , free transfer of name (BBNKB) with significant value  $0,013 < 0,05$ , and socialization with significant value  $0,000 < 0,05$ . Simultaneously all variabels had an effect on taxpayer to pay motor vehicle tax at SAMSAT Brebes Joint Office with significant value  $0,000 < 0,05$ .*

**Keywords:** *program pemutihan motor vehicle tax, free transfer of name, sosialization taxation, taxpayer compliance.*

---

## **A. PENDAHULUAN**

Hampir seluruh daerah di Indonesia menggali potensi pendapatannya melalui pajak daerah, untuk itu pemerintah daerah harus mampu meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya. Perubahan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pada sektor pajak ialah dengan cara merubah sistem pemungutan pajak terdahulu. yaitu dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*.

Salah satu obyek pajak yang diserahkan pengaturan dan pengelolannya pada pemerintah daerah provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB). Mengingat kebutuhan terhadap kendaraan bermotor disetiap daerah sangat besar. Tidak terkecuali Kabupaten Brebes yang merupakan wilayah terluas kedua di Jawa Tengah. Hal ini yang menyebabkan daya beli terhadap kendaraan sangat banyak, karena untuk menunjang mobilitas yang semakin tinggi di wilayah tersebut.

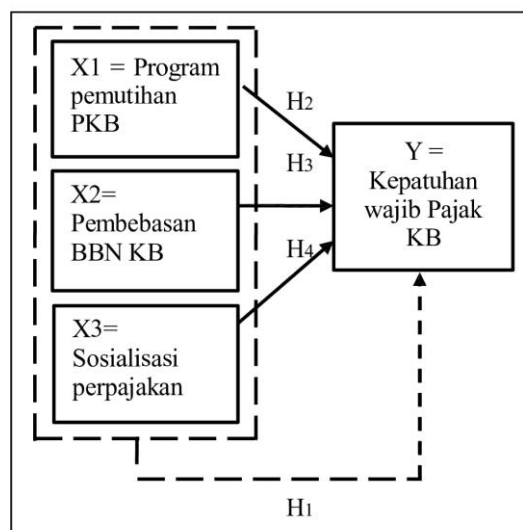
Tingkat rendahnya kepatuhan wajib pajak diakibatkan karena belum optimalnya penerapan peraturan dan kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Kepala Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bahwa masih banyak tunggakan pajak kendaraan bermotor yang terjadi di kabupaten Brebes.

Kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajak dapat timbul apabila wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak serta besarnya sanksi administrasi yang ada. Dalam rangka menarik minat wajib pajak dan untuk meringankan beban wajib pajak, maka Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 44 tahun 2017 tentang Tata cara pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II bagi kendaraan bermotor dalam dan luar Provinsi Jawa Tengah dan Pembebasan Sanksi Administratif pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan diatas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Brebes).”

**B. KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

Hipotesis dalam penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah, serta teori yang telah dijabarkan sebelumnya, sehingga dapat membentuk model hipotesis yaitu sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

Keterangan = - - - = Simultan  
 —————> = Parsial

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor antara lain yaitu program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan.

**2.1 Pengaruh Program PKB, Pembebasan BBNKB, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Dalam melakukan pembayaran pajak tentunya kesadaran serta kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan, hal ini berarti keadaan wajib pajak yang akan melaksanakan hak dan kewajiban akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tata cara pembayaran pajak yang berlaku. Menurut Kurnia (2010; 138) kepatuhan wajib pajak ialah keadaan yang dilakukan wajib pajak untuk melunasi semua kewajiban pajak terutangnya sehingga

wajib pajak dapat melaksanakan hak pajak.

**H1** = Diduga program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## 2.2 Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan peraturan Gubernur nomor 44 tahun 2017 Pemutihan atau yang sering masyarakat sebut dengan pembebasan sanksi administratif merupakan pembebasan terhadap sanksi administratif pajak kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

**H2** = Diduga program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## 2.3 Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 pasal 2 ayat (4) menjelaskan bahwa Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II atau yang disebut dengan BBNKB II merupakan pembebasan yang diberikan oleh gubernur terhadap pokok BBNKB II terhadap kendaraan bermotor dalam atau luar Provinsi. Hal ini bermaksud segala kendaraan bermotor yang dimutasikan ke

dalam dan luar provinsi Jawa Tengah selama masa pembebasan BBNKB II hanya akan dikenakan atau dipungut pokok pajak kendaraan bermotornya saja.

**H3** = Diduga pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

## 2.4 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kurangnya pengetahuan mengenai fungsi membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) akan berdampak pada penerimaan pajak negara. Akan tetapi jika pemerintah dapat berhasil memberikan pengetahuan yang luas mengenai pentingnya membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepada masyarakat maka kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya pasti akan mengalami peningkatan.

Menurut Widnyani dan Suardana, 2016 menjelaskan bahwa Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dapat dilakukan Aparatur Pajak untuk memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya membayarkan kewajiban pajak demi pengembangan daerahnya.

**H4** = Diduga sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

## C. Metode Penelitian

### 3.1 Pemilihan Metode

Penelitian ini merupakan studi kasus, dan metode yang akan peneliti gunakan dalam penelitian

ini ialah kuantitatif dengan metode *Survey*.

### 3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT kabupaten Brebes yang bertempat di jalan Gajah Mada No. 60 Brebes.

### 3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini ialah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor bersama SAMSAT kabupaten Brebes yang berjumlah 117.970 wajib pajak. Yang terbagi atas lima kecamatan yaitu:

**Tabel 3.1 Populasi Penelitian**

| No    | Kecamatan  | Populasi |
|-------|------------|----------|
| 1     | Brebes     | 42.889   |
| 2     | Jatibarang | 15.897   |
| 3     | Songgom    | 11.299   |
| 4     | Wanasari   | 25.228   |
| 5     | Larangan   | 22.647   |
| Total |            | 117.970  |

**Sumber: BPS Kab. Brebes (2016)**

Teknik pengambilan sampel yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah teknik *Sampling Insidental*.

Penentuan jumlah sampel yang akan peneliti uji ditentukan dengan menggunakan rumus Solvin yaitu sebagai berikut:

Rumus =

$$\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{N}}} = e$$

Keterangan: n = Ukuran Sampel  
 N = Ukuran Populasi  
 e = Error (0,1)

Berdasarkan rumus Slovin diatas, maka jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 99,915 atau ditulis 100 wajib pajak.

### 3.4 Definisi Konseptual dan Oprasional Variabel

**Tabel 3.2 Definisi Konseptual**

| Variabel  | Definisi Konseptual   |
|---|---|
| Kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)      | Menurut Kurnia (2010;138) kepatuhan wajib pajak ialah keadaan yang dilakukan wajib pajak untuk melunasi semua kewajiban pajak terutangnya sehingga wajib pajak dapat melaksanakan hak pajak.  |
| Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X1)   | Berdasarkan peraturan Gubernur nomor 44 tahun 2017 Pemutihan atau yang sering masyarakat sebut dengan pembebasan sanksi administratif merupakan pembebasan terhadap sanksi administratif pajak kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. |
| Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) | pembebasan Bea balik nama kendaraan ialah proses atau cara yang dilakukan atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang terjadi karena adanya jual beli agar tidak dikenakan pungutan biaya dalam prosesnya.  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Sosialisasi Perpajakan (X3) | Menurut Widnyani dan Suardana, 2016 Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dapat dilakukan Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya membayarkan kewajiban pajak demi pengembangan daerahnya. |
|-----------------------------|--|

**Tabel 3.3**  
**Oprasional Variabel**

| Variabel   | Dimensi   | Indikator   | Item                               | Skala   |
|--|---|---|------------------------------------|---|
| Program pemutihan pajak kendaraan bermotor (X1)<br>(Wardani ; 2017)  | 1. <i>Sunset Policy</i><br><br>2. Kesadaran wajib pajak     | Program pembebasan sanksi administrasi pajak<br><br>a. Hak dan kewajiban<br>b. Kepercayaan Masyarakat<br>c. Dorongan dari diri sendiri  | 1-3<br><br>4-5<br>6<br>7-8         | Interval  |
| Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (X2)<br>(Sayuti ; 2014) | 1. Pengetahuan pajak<br><br>2. <i>reliability</i>           | a. Pemahaman mengenai prosedur Balik Nama Kendaraan Bermotor<br>b. Syarat Balik Nama Kendaraan Bermotor<br>c. Pemahaman mengenai pembayaran administrasi Balik Nama<br><br>a. Petugas memberikan pelayanan cek fisik kendaraan sesuai prosedur<br>b. Petugas memberikan pelayanan cek fisik kendaraan tanpa kesalahan<br>c. Petugas memberikan pelayanan cek fisik kendaraan bermotor secara professional | 1<br><br>2<br>3<br><br>4<br>5<br>6 | Interval  |
| Sosialisasi perpajakan (X3)<br>(Fatmawati;2016)                      | 1. Pendekatan Diri<br><br>2. Publikasi<br><br>3. Informatif | Sosialisasi dilakukan langsung oleh petugas pajak<br><br>Sosialisasi perpajakan dilakukan dengan memanfaatkan media masa<br><br>a. Materi sosialisasi yang digunakan mudah dimengerti   | 1<br><br>2<br><br>3                | Sosialisasi perpajakan (X3)<br>(Fatmawati;2016) |

|  |                                |  |     |          |
|--|--------------------------------|--|-----|----------|
|  |                                | b. Sosialisasi dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak        | 4   |          |
|  |                                | c. Sosialisasi yang dilakukan bersifat efektif dan tepat sasaran | 5   |          |
| Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y)<br><br>(Fatmawati;2016) | 1. Ketepatan                   | a. Ketepatan Waktu   | 1   | Interval |
|  |                                | b. Total Pembayaran Pajak  | 2-3 |          |
|  |                                | c. Informasi disampaikan secara Lengkap dan Benar                | 4   |          |
| 2. Ketaatan  | a. Taat terhadap UU Perpajakan | 5  |     |          |
|  |                                | b. Tidak Pernah terlibat tindak pidana dibidang perpajakan.      | 6-7 |          |

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan observasi, kuesioner, dan dokumentasi yang nantinya akan diperoleh dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

tersebut diberlakukan pada jumlah populasi yang ada.

Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini ialah dengan menggunakan regresi linier berganda yaitu dengan persamaan:

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + b_3.X_3 + e$$

### 3.6 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang akan peneliti terapkan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan perhitungan komputer dengan dibantu program pengolahan data berupa SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Pengolahan data dalam penelitian adalah dengan cara melakukan pengujian terhadap uji kualitas data dengan menggunakan uji validitas dan uji realibilitas.

Keterangan:

- Y = Variabel Dependen
- a = Konstanta
- b = Koefisien Regresi
- X1 = Variabel independen 1
- X2 = Variabel independen 2
- X3 = Variabel independen 3 e = Error 0,05%

### 3.7 Analisis Data dan Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang akan peneliti gunakan ialah statistik inferensial. Menurut Sugiyono (2013; 170) statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan peneliti dalam menganalisis data sampel yang kemudian hasil analisis

Untuk menguji hipotesis regresi linier berganda, analisis yang akan digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara variabel X terhadap Variabel Y dapat dilakukan dengan cara melakukan uji koefisien determinasi, uji F dan uji t.

## D. HASIL

### 4.1 Statistik Deskriptif

**Tabel 4.1 Hasil uji Statistik Deskriptif**

|                        | N   | Minimum | Maximum | Mean  | Std. Deviation |
|------------------------|-----|---------|---------|-------|----------------|
| Pemutihan PKB          | 100 | 21      | 38      | 29,03 | 3,828          |
| Pembebasan BBNKB       | 100 | 15      | 28      | 21,80 | 3,111          |
| Sosialisasi Perpajakan | 100 | 12      | 23      | 18,15 | 2,869          |
| Kepatuhan Wajib PKB    | 100 | 19      | 33      | 26,08 | 2,894          |
| Valid N (listwise)     | 100 |         |         |       |                |

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2018

Berdasarkan tabel analisis statistik deskriptif diatas diperoleh hasil sebagai berikut:

- Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki nilai minimum sebesar 21 dan nilai maksimum sebesar 37 dengan rata-rata total jawaban responden berjumlah 29,03 dan standar deviasi 3,828.
- Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memiliki nilai minimum sebesar 15 dan nilai maksimum sebesar 28 dengan rata-rata total jawaban berjumlah 21,80 dan standar deviasi 3,111.
- Sosialisasi perpajakan responden menunjukkan nilai minimum jawaban responden sebesar 12 dan maksimum sebesar 23 dengan nilai rata-rata total jawaban sebesar 18,15 dan standar deviasi 2,869.
- Kepatuhan wajib pajak kendraan bermotor memiliki nilai minimum sebesar 19 dan maksimum sebesar 33 dengan rata-rata total jawaban responden sebesar 26,08 dan standar deviasi sebesar 2,894.

### 4.2 Hasil Uji Kualitas Data

#### Uji Validitas Instrumen

**Tabel 4.2  
Uji Validitas Program Pemutihan  
Pajak Kendaraan Bermotor**

| Pernyataan              | <i>Pearson Correlatin</i> | Sig. | Keterangan |
|-------------------------|---------------------------|------|------------|
| Program pemutihan PKB 1 | ,557                      | ,000 | Valid      |
| Program pemutihan PKB 2 | ,517                      | ,000 | Valid      |
| Program pemutihan PKB 3 | ,436                      | ,000 | Valid      |
| Program pemutihan PKB 4 | ,432                      | ,000 | Valid      |
| Program pemutihan PKB 5 | ,412                      | ,000 | Valid      |
| Program pemutihan PKB 6 | ,578                      | ,000 | Valid      |
| Program Pemutihan PKB 7 | ,760                      | ,000 | Valid      |
| Program pemutihan PKB 8 | ,801                      | ,000 | Valid      |

**Sumber: Data prime yang diolah, 2018**

Tabel 4.2 menunjukan bahwa semua item pertanyaan untuk variabel independen Program pemutihan pajak kendaraan bermotor berada pada tingkat signifikansi yaitu dibawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan penelitian dikatakan valid. Untuk tabel selanjutnya menunjukkan hasil uji validitas dari variabel pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dengan 100 sampel responden.

**Tabel 4.3**  
**Uji Validitas Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

| Pernyataan         | <i>Pearson Correlatin</i> | Sig. | Keterangan |
|--------------------|---------------------------|------|------------|
| Pembebasan BBNKB 1 | ,441                      | ,000 | Valid      |
| Pembebasan BBNKB 2 | ,454                      | ,000 | Valid      |
| Pembebasan BBNKB 3 | ,463                      | ,000 | Valid      |
| Pembebasan BBNKB 4 | ,587                      | ,000 | Valid      |
| Pembebasan BBNKB 5 | ,816                      | ,000 | Valid      |
| Pembebasan BBNKB 6 | ,828                      | ,000 | Valid      |

Sumber: Data prime yang diolah, 2018

Tabel 4.3 terlihat bahwa semua item pernyataan untuk variabel pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berada pada tingkat signifikan, yaitu dibawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan penelitian tersebut bersifat valid. Tabel dibawah ini menunjukkan hasil dari uji validitas dari variabel sosialisasi perpajakan dengan 100 sampel responden.

**Tabel 4.4**  
**Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan**

| Pernyataan | <i>Pearson Correlatin</i> | Sig. | keterangan |
|------------|---------------------------|------|------------|
| SP 1       | ,478                      | ,000 | Valid      |
| SP 2       | ,616                      | ,000 | Valid      |
| SP 3       | ,851                      | ,000 | Valid      |
| SP 4       | ,873                      | ,000 | Valid      |
| SP 5       | ,335                      | ,001 | Valid      |

Sumber: Data prime yang diolah, 2018

Pada tabel 4.4 terlihat bahwa semua item pernyataan untuk variabel

yang memiliki subvariabel sosialisasi perpajakan menunjukkan pada tingkat signifikan yaitu dibawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam penelitian tersebut dikatakan valid.

**Tabel 4.5**  
**Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

| Pernyataan | <i>Pearson Correlatin</i> | Sig. | Keterangan |
|------------|---------------------------|------|------------|
| KWPKB 1    | ,583                      | ,000 | Valid      |
| KWPKB 2    | ,563                      | ,000 | Valid      |
| KWPKB 3    | ,509                      | ,000 | Valid      |
| KWPKB 4    | ,523                      | ,000 | Valid      |
| KWPKB 5    | ,404                      | ,000 | Valid      |
| KWPKB 6    | ,574                      | ,000 | Valid      |
| KWPKB 7    | ,718                      | ,000 | Valid      |

Sumber: Data prime yang diolah, 2018

Tabel 4.5 memperlihatkan bahwa semua item pernyataan untuk variabel yang memiliki subvariabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor berada pada tingkat signifikan yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan penelitian dikatakan valid.

**Tabel 4.6**  
**Uji Reliabilitas Instrumen**

| Variabel                                 | <i>Cronbach's Alpha</i> | <i>N of Item</i> | Keterangan |
|--|-------------------------|------------------|------------|
| Program pemutihan PKB                    | 0,705                   | 8                | Reliabel   |
| Pembebasan BBNKB                         | 0,666                   | 6                | Reliabel   |
| Sosisalisasi Perpajakan                  | 0,665                   | 5                | Reliabel   |
| Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor | 0,623                   | 7                | Reliabel   |

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Reabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik apabila



memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Sebaliknya reabilitas dikatakan tidak baik apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* < 0,60. Pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa pernyataan dalam kuesioner memiliki nilai > 0,60 sehingga kuesioner dapat dinyatakan reliabel. Hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan mampu memperoleh data yang konsisten sehingga jika pernyataan tersebut diajukan kembali akan memperoleh jawaban yang relatif sama.

### 4.3 Hasil Uji Hipotesis

#### Uji Regresi Linier Berganda

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

| Model | Unstandardized Coefficients <sup>a</sup> |            | Standardized Coefficients |       | T      | Sig. |
|-------|--|------------|---------------------------|-------|--------|------|
|       | B  | Std. Error | Beta                      |       |        |      |
| 1     |  |            |                           |       |        |      |
|       | (Constant)                               | 3,737      | ,505                      |       | 7,403  | ,000 |
|       | Pemutihan PKB                            | ,959       | ,054                      | 1,268 | 17,663 | ,000 |
|       | Pembebasan BBNKB                         | ,292       | ,115                      | ,314  | 2,541  | ,013 |
|       | Sosialisasi Perpajakan                   | -,653      | ,104                      | -,648 | -6,276 | ,000 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib PKB

**Sumber: Data Primer Yang diolah, 2018**

Berdasarkan tabel diatas, maka didapatkan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 3,737 + 0,959X_1 + 0,292X_2 - 0,653X_3 + 0,05\%e$$

Keterangan:

X1 = Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

X2 = Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

X3 = Sosialisasi Perpajakan

e = error

Dari persamaan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1) Nilai konstanta sebesar 3,737, yang berarti apabila program pemutihan pajak kendaraan bermotor,

pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan bernilai 0 (nol), maka nilai dari variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor bernilai 3,737.

2) Nilai pada variabel X1 (program pemutihan pajak kendaraan bermotor) sebesar 0,959 mempunyai arti, jika variabel X1 memiliki peningkatan nilai terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, maka peningkatan tersebut akan meningkat sebesar 0,959.

3) Nilai pada variabel X2 (pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor) sebesar 0,292 mempunyai arti, jika variabel X2 memiliki peningkatan nilai terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, maka peningkatan tersebut akan meningkat sebesar 0,292.

4) Nilai pada variabel X3 (sosialisasi perpajakan) sebesar -0,653 mempunyai arti, jika variabel X3 memiliki peningkatan nilai terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, maka peningkatan tersebut akan meningkat sebesar -0,653.

#### Uji Signifikansi Secara Simultan (Uji F)

Uji statistik F digunakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh yang terjadi antara variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama atau secara simultan. Untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau tidak ada kriteria yang digunakan yaitu apabila probabilitas > 0,05 maka Hipotesis tersebut diterima sedangkan jika nilai probabilitasnya < 0,05 maka hipotesis tersebut ditolak. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil uji statistik F yaitu:

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Statistik F**  
ANOVA<sup>a</sup>

| Model |            | Sum of Squares | Df | Mean Square | F       | Sig.              |
|-------|------------|----------------|----|-------------|---------|-------------------|
| 1     | Regression | 792,384        | 3  | 264,128     | 685,747 | ,000 <sup>b</sup> |
|       | Residual   | 36,976         | 96 | ,385        |         |                   |
|       | Total      | 829,360        | 99 |             |         |                   |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib PKB

b. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Pemutihan PKB, Pembebasan BBNKB

**Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2018**

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti nilai signifikan lebih kecil dibandingkan dengan nilai probabilitasnya ( $0,000 < 0,05$ ) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dari hasil uji hipotesis yang ada, menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, semakin tinggi nilai variabelnya maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

#### Uji Signifikansi Secara Parsial (Uji t)

Uji statistik t digunakan dengan tujuan untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang terjadi terhadap masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tingkat signifikansi sebesar 0,05 dan

untuk hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 4.9 dengan kriteria, jika nilai probability  $t < 0,05$  maka Hipotesis diterima, sedangkan jika nilai probability  $> 0,05$  maka Hipotesis ditolak.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Statistik t**  
Coefficients<sup>a</sup>

| Model |                        | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|-------|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
|       |                        | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| 1     | (Constant)             | 3,737                       | ,505       |                           | 7,403  | ,000 |
|       | Pemutihan PKB          | ,959                        | ,054       | 1,268                     | 17,663 | ,000 |
|       | Pembebasan BBNKB       | ,292                        | ,115       | ,314                      | 2,541  | ,013 |
|       | Sosialisasi Perpajakan | -,653                       | ,104       | -,648                     | -6,276 | ,000 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib PKB

**Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2018**

- 1) Dalam tabel 4.9 terlihat program pemutihan PKB diperoleh thitung = 17,663 yaitu lebih besar dari ttabel = 1,985. Dengan demikian secara individual program pemutihan PKB berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan PKB memiliki nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  berarti terdapat pengaruh yang signifikan, dan dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 2 bisa diterima.
- 2) Variabel independen yang kedua yaitu pembebasan BBNKB diperoleh thitung = 2,541  $>$  ttabel 1,985 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,013 sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 3 diterima dan Hipotesis ditolak, yang artinya pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 3) Variabel independen sosialisasi perpajakan diperoleh thitung sebesar -6,276  $<$  ttabel 1,985 yang berarti sosialisasi perpajakan

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y. Nilai t negatif menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan Y. serta memiliki nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ , hal ini berarti Hipotesis 4 dikatakan dapat diterima. Sehingga sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

#### Uji koefisien determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) berfungsi untuk menunjukan seberapa besar presentase variasi yang terjadi pada variabel dependen koefisien maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | ,977 <sup>a</sup> | ,955     | ,954              | ,621                       |

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Pemutihan PKB, Pembebasan BBNKB

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh nilai adjusted  $R^2$  sebesar 0,954 atau sebesar 95,4%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah presentase yang disumbangkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini sebesar 95,4%. Atau variasi yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini hanya sebesar 95,4% sedangkan sisanya yaitu sebesar 4,6% dipengaruhi oleh variabel lain seperti kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

#### 4.4 Pembahasan

- 1) Pengaruh Program Pemutihan PKB, Pembebasan BBNKB, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil uji hipotesis 1 menunjukkan bahwa, program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB), pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan sosialisasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 atau  $0,000 < 0,05$ .

- 2) Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil uji hipotesis 2 memiliki nilai thitung pada variabel program pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan nilai thitung 17,663 lebih besar dari t table 1,985 atau thitung  $>$  ttabel dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  maka dapat ditarik kesimpulan bahwa  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

- 3) Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Hasil uji hipotesis 3 ( $H_3$ ) yaitu pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memiliki hasil koefisien

regresi dengan nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan t tabel yaitu sebesar  $0,2,541 > 1,985$  dan memiliki nilai probabilitas lebih rendah dari nilai signifikansi yaitu sebesar  $0,013 < 0,05$  yang berarti pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil koefisien regresi pada uji hipotesis 4 bernilai  $6,276 > 1,985$ , nilai t negatif menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan nilai probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$  yang berarti sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor bersama samsat Brebes.

5) Hasil Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,954 atau sama dengan 95,4% yang berarti variabel Program pemutihan pajak kendaraan bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan sosialisasi perpajakan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan nilai sebesar 95,4%. Sedangkan sisanya yaitu 4,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

- 1) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 2) Pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 3) Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 4) Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 5) Program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh sebesar 95,4% sedangkan sisanya yaitu sebesar 4,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini, misalnya kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.

### 5.2 Saran

- 1) Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, pemerintah pusat hendaknya dapat membuat peraturan terbaru mengenai perpajakan yang dapat meringankan beban wajib pajak terkait denda keterlambatan pajak serta dapat mensosialisasikan peraturan tersebut secara merata kesetiap plosok daerah sehingga kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

- dapat mengetahui peraturan yang ada dan diharapkan menjadi patuh terhadap pajak.
- 2) Diharapkan bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, jika program pemutihan pajak kendaraan bermotor diadakan kembali, agar dilakukan penambahan waktu pelaksanaan pemutihan pajak, sehingga akan banyak lagi wajib pajak yang membayarkan tunggakan pajak mereka.
  - 3) Mengingat kebijakan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor bukan kali pertama yang diadakan oleh Pemerintah Jawa Tengah, diharapkan dalam membuat suatu kebijakan pemerintah hendaknya dapat menilai manfaat serta keuntungan bagi wajib pajak dari pelaksanaan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga pemerintah dapat menggunakan salah satu keuntungan dan manfaat yang terjadi pada saat itu untuk bisa diterapkan
  - sehingga pembebasan bea balik nama dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
  - 4) Peran aparat pajak dalam mensukseskan suatu program perpajakan sangat penting, salah satunya yaitu dengan sosialisasi perpajakan. Akan tetapi bagi sebagian wajib pajak yang jauh dari hiruk pikuk keramaian tentunya masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui terkait peraturan perpajakan yang ada, sehingga aparat pajak diharapkan mampu memberikan sosialisasi perpajakan hingga plosok desa.
  - 5) Bagi peneliti selanjutnya, untuk menambahkan variabel independen lain diluar penelitian ini dan dapat memperluas cakupan wilayah penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih akurat lagi.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti, Indri (indri.afriyanti1996@gmail.com). 2017, 24 Februari. *Analisa Penerapan Program Bebas Balik Nama (BBN) II dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat)*. E-mail kepada Cinti Rahayu (cintirahayu13@gmail.com)
- Dharma, Gede Pani Esa dan Ketut Alit Suardana. 2014. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak." E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6.1 (2014): 340-353
- Efferin, Sujoko, dkk. 2008. *Metode Penelitian Akuntansi Mengungkap Fenomena Dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.3. September (2016): 2176-2203

- Ephipaniyas. 2014. Pengaruh Penerapan Tarif Pajak dan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Universitas Komputer Indonesia
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 19-5/E.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 21. Edisi 7. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- <https://kbbi.web.id/bebas> (27 Februari 2018)
- Priantara, Diaz. 2016. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Republik Indonesia. 2002. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2017. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Bagi Kendaraan Bermotor Dalam dan Luar Provinsi Jawa Tengah dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor.
- Sugiarto. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Widnyani, Ida Ayu Dewi dan Ketut Alit Suardana. 2016. “Pengaruh Sosialisasi, Sanksi dan Presepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.”